



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. YUDI SASTRO, SP., MP.
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 723874

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.020.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/38 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 820.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **119.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH ULTIMO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR 150 STREET FIRE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **370.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **357.700.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.866.700.000

III. HUTANG

Rp. 720.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.146.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.